

PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA SONI KECAMATAN DAMPAL SELATAN KABUPATEN TOLI-TOLI

Andini^{1)*}, Syahrudin Hattab²⁾, Askar Mayusa³⁾

¹ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
ad462221@gmail.com

² Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
syahrudinhattab88@gmail.com

³ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
mayusaaskar@gmail.com

ABSTRAK.

Pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan dan mobilitas masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa, ketua BPD, tokoh pendidik, tokoh agama, tokoh perempuan, dan warga setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan jalan telah melalui tahap penyusunan rencana secara partisipatif melalui Musyawarah Dusun, namun pada tahap penetapan rencana masih terdapat kendala dalam partisipasi masyarakat akibat terbatasnya keterlibatan dalam forum-forum resmi. Pengendalian pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksana dan pengawas desa, meskipun masih dihadapkan pada masalah pembebasan lahan yang belum terselesaikan secara optimal. Sementara itu, tahap evaluasi belum berjalan secara terstruktur dan belum melibatkan instrumen pengukuran dampak atau kepuasan masyarakat. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan perencanaan telah berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan partisipatif, namun perlu penguatan dalam aspek implementasi dan evaluasi agar pembangunan jalan di Desa Soni dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Perencanaan Desa, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan

ABSTRACT

Road infrastructure development is a crucial aspect in supporting the improvement of community welfare and mobility in rural areas. This study aims to describe and analyze the planning of road infrastructure development in Soni Village, Dampal Selatan Subdistrict, Toli-Toli Regency. The research employed a descriptive qualitative approach using data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. Informants in this study included the village head, head of the Village Consultative Body, educational figures, religious leaders, women's representatives, and local residents. The results show that the planning process has gone through the formulation stage in a participatory manner through hamlet-level deliberations; however, the plan determination stage still faces challenges due to limited community involvement in official planning forums. Implementation control was carried out by the village implementation and supervision teams, although land acquisition issues remain unresolved. Meanwhile, the evaluation stage has not been conducted in a structured manner and lacks instruments to measure the impact or community satisfaction. The conclusion of this study indicates that the planning stages have generally followed participatory development principles, but improvements are needed in implementation and evaluation aspects to ensure that road development in Soni Village proceeds more effectively and sustainably.

Keywords: *Village Planning, Community Participation, Development*

Submisi: 18-06-2025
Diterima: 19-06-2025
Dipublikasikan: 08-08-2025

PENDAHULUAN

Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli merupakan salah satu desa yang tengah memprioritaskan pengembangan infrastruktur jalan. Namun dalam praktiknya, proses perencanaan pembangunan menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan anggaran, tantangan dalam pembebasan lahan, serta ketimpangan prioritas antar dusun. Kondisi jalan yang masih rusak dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan, menjadi urgensi yang mendesak untuk segera ditangani. Kajian pustaka menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan sistem perencanaan yang terstruktur memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur desa.

Fuaddi dan Khamid, (2020) dalam hasil penelitiannya, menyatakan bahwa pembangunan fisik seperti jalan usaha tani mampu mendorong produktivitas pertanian jika didukung oleh partisipasi dan pemeliharaan masyarakat. Pembangunan infrastruktur Jalan Usaha Tani merupakan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa sebagai prioritas utama pembangunan untuk mendukung mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Cikakak Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.

Putra dan Mursyidah, (2023), menekankan pentingnya keterlibatan warga dalam setiap tahap perencanaan. Teori Bintoro Tjokroamidjojo menjadi dasar pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini, yaitu mencakup tahapan penyusunan, penetapan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi rencana pembangunan.

Strategi peningkatan infrastruktur jalan di Desa Soni, melalui suatu proses perencanaan yang dimulai dengan penyusunan rencana yang melibatkan pihak-pihak terkait untuk membuat gambar perencanaan jalan, termasuk model desain jalan dan detail teknisnya. Dalam proses tersebut, perencana juga menentukan spesifikasi jalan, seperti ketinggian dari permukaan tanah yang harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Perencanaan ini menjadi acuan utama untuk pelaksanaan pembangunan jalan agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah Panjang jalan menurut kondisi jalan di Desa Soni di mana kondisi jalan pada tahun 2021-2024 tidak mengalami perubahan yaitu 4 Kilometer Adapun kondisi jalan sedang pada tahun 2021 dan 2022 yaitu 1 Kilometer dan menurun pada tahun 2023 dan 2024 yaitu 1 Kilometer dan kondisi jalan rusak mengalami penurunan signifikan yaitu pada tahun 2021 dan 2022 yaitu 859 Meter dan mengalami penurunan pada tahun 2023 yaitu 574 Meter dan pada tahun 2024 yaitu 308 Meter. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi jalan di Desa Soni yang di lihat dari 4 tahun terakhir jumlah (Kilometer) jalan dengan kondisi baik, sedang, rusak, terus mengalami penurunan.

Rencana tersebut, ternyata berbanding terbalik dengan pendapat masyarakat Desa Soni yang merasa infrastruktur jalan di Desa Soni masih membutuhkan perhatian lebih. Saat ini, kondisi jalan di beberapa area cukup memprihatinkan. Kondisi ini tentu berdampak pada aktivitas masyarakat sehari-hari, seperti sulitnya mengangkut hasil pertanian atau bepergian, terutama saat musim hujan. Sering menyulitkan mobilitas, baik untuk warga maupun kendaraan. Sehingga peran pemerintah desa sangat penting dalam perencanaan dan perbaikan infrastruktur jalan. Pemerintah desa berusaha untuk mendengar kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), dimana masyarakat diajak berdiskusi mengenai jalan mana yang

perlu diperbaiki atau dibangun. Pemerintah desa juga sudah melakukan beberapa langkah nyata, seperti pembangunan jalan usaha tani di Dusun Perbatasan dan Dusun Bangkudu, serta perbaikan jalan yang menuju perkuburan. Selain itu, pemerintah desa memperhatikan aspek teknis dengan membuat talut dan irigasi di beberapa titik jalan agar aliran air tidak merusak jalan yang sudah dibangun. Namun, meskipun ada usaha yang baik dari pemerintah desa, peran mereka dalam hal pembebasan lahan untuk jalan masih menjadi tantangan. Pembebasan lahan sering kali menjadi hambatan, terutama jika pemilik tanah tidak bersedia memberikan tanah mereka secara gratis. Hal ini perlu diperhatikan agar pembangunan jalan bisa lebih lancar. Adapun permasalahan lainnya pada desa soni yaitu adanya keterlambatan dana ADD desa dari pemerintahan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan program desa seperti infrastruktur jalan menjadi tertunda sehingga kebutuhan masyarakat tidak segera terpenuhi dan kesenjangan prioritas antar dusun, banyak permintaan dari dusun dapat memicu konflik antar dusun jika salah satu merasa tidak di prioritaskan, sementara ADD yang lambat mempersempit ruang gerak pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara adil, pembangunan tidak merata juga menjadi akibatnya desa hanya mampu memenuhi sebagian kecil permintaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan penelitian yaitu deskriptif. Denzin dan Lincoln (1994), bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dalam lingkungan alami untuk memahami dan menganalisis berbagai peristiwa yang terjadi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggunakan berbagai metode yang sesuai dan relevan dengan kondisi saat ini untuk mengeksplorasi fenomena secara menyeluruh. Sehingga, dengan pendekatan penelitian tersebut di atas bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh proses perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli.

Definisi konsep dalam penelitian ini, berdasar pada teori perencanaan yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (1981) bahwa terdapat aspek-aspek dalam perencanaan yaitu mencakup tahapan penyusunan, penetapan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi rencana pembangunan.

Teknik pengumpulan data, dilakukan melalui tiga cara utama, yaitu observasi langsung ke lokasi pembangunan, dokumentasi terhadap dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta wawancara mendalam dengan informan kunci seperti Kepala Desa, Ketua BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan warga desa.

Penentuan informan dalam penelitian yaitu gunakan teknik *purposive*. Maka, Peneliti memilih informan berdasarkan keterlibatan mereka dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan. Untuk menjawab tantangan keterlambatan pelaksanaan dan rendahnya partisipasi masyarakat, peneliti menggunakan pendekatan partisipatif yang memetakan peran setiap aktor lokal.

Analisis data dilakukan secara model interaktif melalui beberapa tahapan. Miles,

Huberman, dan Saldana, (2014) langkah-langkah analisis model interaktif yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Lokasi atau tempat penelitian ini yaitu di Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli, dengan waktu pelaksanaan selama empat bulan mulai dari tahap pengumpulan data hingga analisis akhir. Metode ini dipilih untuk menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang menuntut pemahaman menyeluruh terhadap dinamika lokal, hambatan dalam perencanaan, serta efektivitas tahapan pelaksanaan pembangunan jalan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan rencana pembangunan jalan desa melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan perencanaan bersifat partisipatif dan mewakili kebutuhan masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat antara lain aparatur desa, lembaga desa seperti LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), serta tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki potensi, termasuk tokoh agama dan perempuan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan ini penting agar program pembangunan benar-benar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan lokal. Berdasarkan kajian pembangunan infrastruktur jalan di desa soni di simpulkan bahwa secara umum proses pembangunan telah berjalan dengan baik sesuai teori perencanaan pembangunan menurut Bintoro. tahapan Penyusunan Rencana di lakukan melalui tahapan Musyawarah Dusun (Musdus) dan unsur pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan warga. Proses ini menunjukkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam mengusulkan kebutuhan pembangunan, termasuk pembangunan jalan yang menjadi prioritas utama di antaranya sepanjang 3.320 meter mengalami kerusakan jalan desa beraspal dan jalan antar desa 1.300 meter yang menjadi prioritas perbaikan dan di dusun tanjung 2 dan tengah 1 adanya jalan tani yang belum bisa di lalui kendaraan.

Proses penetapan rencana di Desa Soni dilakukan secara bertahap dan partisipatif. Mekanismenya dimulai dari musyawarah dusun (MUSDUS), di mana masing-masing dusun mengidentifikasi kebutuhan pembangunan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Hasil dari musyawarah tingkat dusun kemudian dibawa ke tingkat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Di forum ini, dilakukan pengkajian, pemilihan prioritas pembangunan, serta penetapan rencana final secara demokratis, biasanya melalui diskusi terbuka atau voting. Partisipasi masyarakat dalam tahap penetapan rencana ini sangat penting untuk memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil warga. Melalui proses ini, masyarakat dapat memahami rencana yang disusun dan turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Bahkan jika ada perbedaan pendapat di tingkat warga, seperti perbedaan persepsi terhadap kondisi jalan yang harus diperbaiki, musyawarah menjadi sarana untuk menyamakan persepsi berdasarkan fakta kondisi lapangan. Berdasarkan pembahasan mengenai penetapan rencana pembangunan infrastruktur jalan di desa soni beberapa tahapan mengalami hambatan yaitu tahapan penetapan rencana di antaranya dari 7 prioritas utama pada perbaikan infrastruktur desa sesuai dengan RPJM 2020- 2026 yang terlaksana yaitu sudah adanya bangunan PAUD pada dusun 2 dan dusun 3, dan 6 prioritas

lainnya masih dalam proses.

Proses pengendalian pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Soni dilakukan melalui sistem pengawasan internal yang melibatkan beberapa pihak, yaitu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Tim Pengawas Kegiatan (TPKD), dan dukungan dari pemerintah desa. TPK bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan teknis di lapangan, termasuk pengawasan harian terhadap progres dan kualitas pekerjaan. Pengawasan dilakukan oleh pengawas lapangan atau mandor yang memastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi dan rencana yang telah ditetapkan. Laporan hasil kerja dari TPK kemudian disampaikan kepada TPKD, yang akan melakukan analisis terhadap progres pembangunan dan memberikan rekomendasi serta koordinasi dengan pemerintah desa jika ada masalah. Di simpulkan bahwa pada tahap pengendalian pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di desa soni juga berjalan dengan baik dikarenakan masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan dan pengawasan hal ini sesuai dengan pandangan Bintoro, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana sudah berjalan dengan baik dan dilakukan melalui sistem pengawasan internal yang melibatkan beberapa pihak, yaitu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Tim Pengawas Kegiatan (TPKD), dan dukungan dari pemerintah desa.

Tahap keempat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Soni adalah evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rencana yang telah dilakukan, dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahap ini, berbagai hambatan atau keterbatasan yang dihadapi selama pelaksanaan proyek juga akan diidentifikasi, serta saran-saran untuk perbaikan dan kemajuan di masa mendatang dapat diberikan. Evaluasi terhadap keberhasilan pembangunan jalan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengukur sejauh mana manfaat dari proyek tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh H. Saifullah, Ketua BPD Desa Soni, yang menyatakan bahwa keberhasilan evaluasi diukur dengan seberapa banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari pembangunan tersebut. Evaluasi tidak hanya melihat dari segi fisik jalan yang selesai dibangun, tetapi juga dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Misalnya, jika jalan yang dibangun banyak digunakan oleh warga untuk aktivitas sehari-hari, seperti pergi ke sawah atau menuju fasilitas umum lainnya, maka pembangunan jalan tersebut dianggap berhasil. Sebagai contoh, semakin banyak masyarakat yang menggunakan jalan untuk bolak-balik, semakin jelas tujuan dari pembangunan tersebut tercapai. Begitu pula dengan pembangunan irigasi, semakin banyak sawah yang terairi juga menjadi indikator keberhasilan proyek. Oleh karena itu, evaluasi tidak hanya melihat dari hasil fisik, tetapi juga dari sisi kebermanfaatannya sosial bagi masyarakat.

Selain itu, BPD juga memiliki peran penting dalam memastikan adanya kesesuaian antara rencana awal dan hasil akhir pembangunan. Jika ditemukan ketidaksesuaian yang cukup serius, BPD memiliki kewenangan untuk menolak pertanggungjawaban kepala desa dalam hal ini. Salah satu fungsi pengawasan BPD adalah menilai apakah pembangunan telah dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Jika terdapat ketidaksesuaian yang tidak dapat diselesaikan di tingkat desa, maka BPD dapat menyampaikan persoalan tersebut kepada camat atau bahkan langsung

melaporkan ke aparat penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan. Di simpulkan bahwa pada tahapan evaluasi pembangunan infrastruktur jalan di desa soni telah berjalan secara sistematis untuk memastikan tujuan pembangunan tercapai serta evaluasi di lakukan oleh BPD untuk melihat sejauh mana manfaat proyek tersebut di rasakan masyarakat dan memastikan kesesuaian antara rencana awal dan hasil akhir pembangunan.

Perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli merupakan bentuk implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan jalan di desa ini dilaksanakan melalui empat tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Bintoro Tjokroamidjojo, yaitu: penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi. Pada tahap penyusunan rencana, pelibatan masyarakat dalam forum musyawarah dusun (Musdus) mencerminkan pendekatan partisipatif dan kebutuhan riil warga. Pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan unsur warga berperan aktif dalam mengidentifikasi masalah seperti jalan desa rusak sepanjang 3.320 meter, jalan antar desa 1.300 meter, serta jalan tani yang belum bisa dilalui kendaraan di tanjung 2 dan tengah 1.

Namun, tahap penetapan rencana menghadapi kendala rendahnya partisipasi warga dalam forum formal, disebabkan oleh kesibukan warga dalam pekerjaan harian. Akibatnya, dari tujuh program prioritas dalam RPJMDes 2020–2026, hanya pembangunan PAUD yang terealisasi, sedangkan enam lainnya masih dalam proses. Dalam tahap pengendalian, desa telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Tim Pengawas (TPKD), namun pelaksanaan sering terkendala pembebasan lahan karena pemilik lahan enggan menyerahkan haknya tanpa kompensasi. Hal ini memperlambat progres pembangunan meskipun perencanaan teknis telah matang.

Tahap evaluasi pembangunan belum berjalan optimal. Tidak adanya sistem penilaian formal dan minimnya survei kepuasan masyarakat menyebabkan pembangunan tidak dapat dievaluasi secara menyeluruh. Padahal evaluasi berperan penting untuk mengukur efektivitas pelaksanaan dan kesesuaian hasil dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan belum maksimalnya penerapan prinsip *good governance* dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Pembangunan jalan yang dilakukan bertahap juga berkaitan erat dengan keterbatasan dana desa, yang hanya mampu membiayai sebagian prioritas infrastruktur setiap tahunnya. Akibatnya, kesenjangan kebutuhan antar dusun menjadi nyata, dan dapat memicu ketidakpuasan sosial.

SIMPULAN

Dengan demikian, perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Soni telah berjalan cukup baik pada tahap awal, namun masih memerlukan penguatan dalam hal penetapan keputusan kolektif, penyelesaian masalah teknis pelaksanaan, serta pengembangan sistem evaluasi yang lebih terstruktur. Upaya peningkatan kapasitas partisipasi masyarakat, penyesuaian program prioritas antar dusun, serta optimalisasi

peran pemerintah desa menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan jalan yang merata, berkelanjutan, dan sesuai dengan harapan warga. Namun demikian, terdapat kendala yang signifikan dalam tahap penetapan rencana, di mana partisipasi masyarakat menurun akibat kesibukan dan kurangnya pemahaman akan pentingnya kehadiran dalam forum musyawarah lanjutan. Selain itu, hambatan teknis seperti pembebasan lahan menjadi faktor penghambat dalam tahap pengendalian pelaksanaan rencana, karena belum semua masyarakat bersedia menyerahkan lahannya untuk pembangunan jalan. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan jalan belum berjalan secara sistematis, ditandai dengan belum tersedianya instrumen evaluasi dan belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan. Padahal, evaluasi yang terukur sangat penting untuk menilai sejauh mana program pembangunan memberikan manfaat dan sesuai dengan rencana awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Denzin K. N. Lincoln S. Y. 1994. *Hand Book of Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Fuaddi, S., dan Khamid, A. 2021. Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Cikakak Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. *Infratech Building Journal*. Volume 1, Nomor 02, Hal. 96-102. <https://jurnal.umus.ac.id/index.php/ibj/article/view/1040>
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat desa.
- Putra, K. W., dan Mursyidah, L. 2023. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*. Volume 5, Nomor 2, Hal. 245-253. DOI: <https://doi.org/10.47650/jglp.v5i2.958>
- Tjokroamidjojo, B. 1981. *Perencanaan Pembangunan*, Cetakan 4. Jakarta: Gunung Agung.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

TENTANG PENULIS

Assalaamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Saya Andini, lahir di Desa Taulo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang sebagai Penulis dan Mahasiswa Angkatan Tahun 2021. Alhamdu lillahi rabbil alamin, di tahun 2025 telah menyelesaikan studi di Prodi. Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Kota Palu. Semoga melalui tulisan dan artikel ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.